

- Tim Peneliti PKK-UGM., 1993, *Determinan Pengetahuan, Sikap dan Praktik Kesehatan Reproduksi Remaja di Kota Manado*, laporan Penelitian, Kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Pusat Penelitian Kependudukan,
- Tukiran, Agus Joko Pitoyo, Pande Made Kutanegara (ed), 2010: *Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi*, Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Perpustakaan Pelajar.
- UNFPA, 2004: *Program of Action Adopted at the International Conference on Population and Development*, Cairo 5–13, September 1994, New York: UNFPA.
- BKKBN, 2005: *Kebijakan Teknis Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta.
- Wilopo, Siswanto Agus, 2003: *Achieving Reproductive Health as Key to Reduce a Rural Poverty*, Paper Presented at the ECOSOC of the United nation Roundtable Discussion on Population and reproductive Health in the Rural Context as Critical Determinans in the Achieving of MDGs target at ECOSOC Chambers, New York, April 30.
- Wilopo, Siswanto Agus, 2007: *Pokok-Pokok Pikiran Revitalisasi Program KB Nasional di Era Desentralisasi*, Paper Dipresentasikan pada Kongers IAKMI di Palembang, 24 Agustus 2007.
- Wirutomo, P. 1991: *Perubahan Struktur dan Fungsi Keluarga di Indonesia dalam Industrialisasi*, Makalah dalam Seminar Nasional Dampak Industrialisasi dan Pergeseran Wanita Terhadap Stabilitas dan Kesejahteraan Keluarga, Yogyakarta, Agustus, 1991.

2

Dinamika Sosial Nelayan Lamahala¹ Fishermen Social Dynamic of Lamahala

Robert Siburian²

Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
Gd. Widyagraha PMB LIPI Ruang 9.16 Jl. Jendral Gatot Subroto 10 Jakarta
Diterima 15 Januari 2013, disetujui 6 Maret 2013.

Abstract

Fishing activity has been carried out by fishermen in Lamahala for a long time. It has even been their ancestor heritage for over hundreds of years who migrated from the Mollucas Islands in the north to the village of Lamahala in the southern hemisphere. The hereditary activity which has been carried out for generations can hold out because it is supported by the potential and abundant marine resources there, especially in the Sawu Sea and its surrounding areas. The meeting of two underwater currents, that drive the rising movement of water mass from the bottom to the surface layer of the sea, provides wealthy nutrition that can fertilize the waters which are useful for the growth of various planktons as the source of food for numerous fish species. The problem is the rich marine resources have not been able to raise the level of welfare to be better than before. In fact, it is no doubt that the courage of fishermen there to conquer the huge waves on the Sawu Sea is very high even though they only use a small boat and rely on natural signs so as not to be lost in the vast ocean. It seems that poverty will never get out of their life because of as much as 477 of 1,327 households in the village are still in the level of pre-prosperous family. Based on the reality of their current life, this paper attempts to explain the social dynamics of Lamahala's fishermen.

Keywords: Social Dynamics-Fishermen-Fishing Activities-Lamahala

Abstrak

Aktivitas menangkap ikan sudah lama dilakukan oleh nelayan Lamahala, bahkan aktivitas itu merupakan warisan nenek moyang yang ikut bermigrasi dari Kepulauan Maluku jauh di bagian utara ke Desa Lamahala di belahan selatan ratusan tahun lalu. Aktivitas yang dilakukan secara turun-temurun itu dapat bertahan karena didukung oleh potensi sumberdaya laut yang melimpah terutama yang berada di Laut Sawu dan sekitarnya. Pertemuan dua arus bawah laut yang mendorong gerakan naiknya massa air dari lapisan dalam ke arah permukaan sangat kaya akan unsur hara yang dapat menyuburkan perairan untuk tumbuhnya berbagai plankton sebagai sumber makanan (nutrisi) bagi berbagai jenis ikan. Hanya saja, kekayaan sumberdaya laut tersebut belum mampu mengangkat tingkat kesejahteraan nelayan agar lebih baik. Padahal, tingkat keberanian nelayan untuk menaklukkan besarnya ombak di Laut Sawu tidak perlu diragukan kendati mereka hanya menggunakan perahu kecil dan bergantung pada tanda-tanda alam agar tidak tersesat di tengah samudra yang begitu luas. Kemiskinan seakan tidak pernah beranjak dari kehidupan mereka karena sebanyak 477 rumah tangga dari 1.327 rumah tangga yang ada di Desa Lamahala tergolong keluarga pra sejahtera. Berdasarkan realitas kehidupan yang mereka bangun dan jalani dewasa ini, tulisan ini mencoba menjelaskan dinamika sosial nelayan Lamahala tersebut.

Kata Kunci: Dinamika Sosial-Nelayan-Kegiatan Pencarian Ikan-Lamahala

1) Makalah ini pernah disampaikan pada Seminar Nasional Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta 19 September 2012.
2) Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Jakarta.

A. Nelayan dan Kemiskinan

Indonesia dikenal sebagai negara bahari dengan luas wilayah laut sekitar 5,8 juta km² atau 2/3 dari luas wilayah RI (Sunoto, dalam <http://bulletin.penataan-ruang.net>), atau dengan kata lain, wilayah laut RI lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratnya. Bersamaan dengan itu, Indonesia pun memiliki kawasan pesisir yang begitu luas, berada pada urutan keempat di dunia ini dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 kilometer (Nontji dikutip oleh Imron, 1997: 169). Wilayah pesisir itu menyimpan kekayaan alam yang melimpah, seperti flora, fauna, dan sumberdaya lainnya meliputi pantai, pasir, batu karang, mangrove, dan pemandangan alam. Potensi kekayaan yang berada di kawasan pesisir tidak berdampak signifikan untuk menyejahterakan masyarakat pesisir, walaupun sumberdaya alam tersebut tetap mereka manfaatkan.

Wilayah laut Indonesia tidak hanya luas tetapi juga menyimpan sumberdaya laut yang melimpah. Hal itu dipengaruhi oleh posisi wilayah laut Indonesia yang menjadi pertemuan arus Samudra Pasifik yang berasal dari arah utara dan arus Samudera Indonesia dari arah selatan. Pertemuan dua arus itu menimbulkan gerakan naiknya massa air dari lapisan dalam ke arah permukaan yang sangat kaya akan unsur hara yang menyuburkan perairan. Unsur hara tersebut dapat menumbuhkembangkan berbagai plankton sebagai sumber makanan (nutrisi) bagi berbagai jenis ikan. Dengan kandungan nutrisi itu maka wilayah laut Indonesia juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan.

Indonesia dengan wilayah laut yang begitu luas dan tingkat kesuburan yang tinggi itu, sesungguhnya sudah berperan baik dalam perikanan dunia. Data tahun 2004 misalnya, laporan FAO menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan produksi perikanan tangkap terbesar ke-5 dunia setelah China, Peru, Amerika Serikat, dan Chili. Akan tetapi dari sisi volume, produksi ikan Indonesia masih terbilang kecil, yakni hanya 4,8 juta ton atau sekitar 5,05% dari total perikanan tangkap dunia yang mencapai 95 juta ton (Poernomo, 2011).

Sebenarnya, hasil tangkap tersebut masih mungkin ditingkatkan hingga mencapai jumlah tangkapan yang diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton per tahun, walaupun potensi sumberdaya perikanan tangkap sesungguhnya dapat mencapai 6,4 juta ton per tahun (Yuniardi 2011). Ironis dengan jumlah tangkapan yang melimpah itu ternyata masyarakat yang hidup di wilayah pesisir terutama para nelayan tetap hidup memprihatinkan atau mereka tidak beranjak dari garis kemiskinan.

Populasi masyarakat pesisir³ di Indonesia diperkirakan mencapai 16,42 juta jiwa. Mereka mendiami sekitar 8.090 desa. Menurut hasil analisis SMERU, *Poverty Headcount Index* (PHI) rata-rata 0,3241, yang berarti sekitar 32% dari populasi atau sebanyak 5,25 juta jiwa masyarakat pesisir berada pada level di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah bagian dari penduduk miskin di Indonesia yang menurut data Mei 2007 jumlahnya tercatat sekitar 16,5% dari total 220 juta jiwa, atau sekitar 33 juta jiwa (Rahman, 2007). Dengan demikian, kontribusi masyarakat pesisir yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap penduduk miskin di Indonesia sekitar 15,9%. Realitas kemiskinan masyarakat pesisir sangat ironis dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar yang berada di sektor kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia ini (Ditjen KP3K, 2008).

Penduduk yang bermukim di Desa Lamahala, Pulau Adonara, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi kajian dalam tulisan ini juga dikenal sebagai masyarakat pesisir. Mereka ini adalah bagian dari desa pesisir yang ada di Indonesia tersebut. Desa yang sudah dikenal sebelum abad 13 ini, penduduknya banyak yang bekerja sebagai nelayan. Akan tetapi, kegiatan kenelayan yang sudah berlangsung turun-temurun yang mampu membuat mereka ahli membaca tanda-tanda alam yang terkait dengan kegiatan kenelayan, ternyata belum mampu membuat mereka hidup sejahtera. Data tahun 2007 menunjukkan, dari sekitar 1.327 rumah tangga yang bermukim di Desa Lamahala

3) Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bermukim di daerah pesisir, yaitu wilayah peralihan antara darat dan laut. Ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua.

ini, sebanyak 477 rumah tangga di antaranya tergolong keluarga pra sejahtera.⁴ Oleh sebab itu, mereka ini dapat diasumsikan bagian dari populasi masyarakat pesisir yang berada di level masyarakat miskin.

Realitas penduduk Desa Lamahala sebagai masyarakat yang bermukim di daerah pesisir menjadi hal yang membenarkan argumentasi yang menyebutkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Masalah kemiskinan di wilayah pesisir itu dipicu masalah-masalah lain, yaitu; 1) kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, 2) keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, 3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, 4) kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, 5) degradasi sumber daya lingkungan, dan 6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2006 dikutip Kusnadi 2009: 28). Masalah-masalah di atas mengakibatkan populasi masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya, pedagang ikan, dan pengolah hasil ikan juga menjadi penyumbang terhadap jumlah dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.

Terkait dengan aktivitas kenelayan yang dilakukan oleh penduduk di Desa Lamahala, tulisan ini hendak menjawab beberapa pertanyaan. Pertama adalah bagaimana penduduk di daerah pesisir ini dalam

4) Badan Pusat Statistik membagi tingkat kemiskinan penduduk Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu: Pra Sejahtera, Sejahtera I, dan Sejahtera II. Masing-masing kelompok miskin ini didasarkan kepada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada tingkat tertentu. Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal sesuai kebutuhan dasar pada keluarga pra sejahtera tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologi seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, dan interaksi dengan lingkungan. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangan (menabung dan memperoleh informasi).

kesehariannya, termasuk aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Kedua, bagaimana kegiatan kenelayan itu dilakukan dan daerah yang menjadi tangkapan nelayan. Ketiga, perubahan apa yang terjadi bila dilihat dari aktivitas kenelayan yang dilakukan.

B. Sejarah Lamahala⁵ sampai Pembentukan Desa

Desa Lamahala merupakan bagian dari Kecamatan Adonara Timur, yaitu salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan di Pulau Adonara yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dasar pembentukan kabupaten dan provinsi ini adalah Undang-Undang RI Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Namun demikian, nama Lamahala sudah dikenal sebelum terbentuknya Kecamatan Adonara Timur itu sendiri. Dengan kata lain, Lamahala termasuk permukiman lama di Pulau Adonara.

Desa Lamahala merupakan bekas kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Lamahala. Kerajaan Lamahala ini sudah ada jauh sebelum abad 13, yaitu sebelum adanya Kerajaan Islam Solor Lima Pantai atau dalam bahasa Lamahala disebut *Solor Watan Lema* yang dikenal pada masa itu. Adapun Kerajaan Islam Solor Lima Pantai yang termuat dalam buku *Negarakartagama* terbentuk pada abad 13 meliputi Kerajaan Lamahala, Terong, Lamakera, Lohayang, dan Lebala. Kerajaan Islam Solor Lima Pantai yang terakhir berbeda sebagaimana ditulis oleh Barne (2005: 4) yang tidak menyebut Lebala sebagai salah satu dari lima kerajaan dimaksud tetapi justru memasukkan Kerajaan Adonara.⁶ Kerajaan Islam Solor Lima Pantai berada di empat pulau yang berdekatan, yaitu Pulau Adonara,

5) Sejarah Lamahala ini banyak disarikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AD (62 tahun) yang merupakan tokoh sekaligus Kepala Desa Lamahala Jaya, 24 Juli 2011 di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur.

6) Dalam wawancara dengan informan, kerajaan ini berdiri sekitar abad 15 ketika Portugis datang ke Pulau Adonara sementara Kerajaan Islam Solor Lima Pantai berdiri pada abad 13. Bekas Kerajaan Adonara berada di Adonara Timur bagian utara.

Lomblen (Lembata), dan Solor. Kelima kerajaan ini dihubungkan oleh Selat Solor, Lamakera, dan Solong. Mengingat selat ini tidak begitu lebar sehingga satu kerajaan dengan kerajaan lain saling berdekatan. Khusus untuk Kerajaan Lamahala yang pada pemerintahan Indonesia menjadi sebuah desa seperti yang ada dalam kajian ini, tatanan kerajaannya terdiri atas himpunan masyarakat pendatang yang ada di kampung Lamahala. Asal penduduk pendatang tersebut datang dari berbagai pulau antara lain Seram, Maluku, Banda, Ternate, Sulawesi Selatan, Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau di sekitar Adonara. Sementara orang yang pertama menapak jejak di Lamahala berasal dari Pulau Sumatera. Orang Lamahala menyebut orang tersebut dengan nama Raja Pati Pelang.⁷

Raja Pati Pelang datang ke Lamahala dalam rangka syiar agama Islam. Setelah beliau lama bermukim di sana ternyata jumlah pendatang pun semakin banyak, sehingga dianggap perlu untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin yang akan memimpin mereka. Untuk maksud tersebut, beliau mengumpulkan seluruh kelompok masyarakat untuk bersepakat membentuk sebuah kampung sebagai tempat tinggal bersama. Setelah para pendatang dan penduduk asli berkumpul, Raja Pati Pelang pun menawarkan posisi pemimpin kepada orang-orang pendatang tersebut. Akan tetapi, tawaran menjadi pemimpin yang disampaikan oleh Raja Pati Pelang kepada masyarakat pendatang kurang diminati. Argumentasi itu terlihat dari ketidakadaan dari antara mereka yang bersedia menjadi pemimpin. Oleh karena para pendatang yang datang ke Lamahala rata-rata sudah memiliki keahlian tersendiri seperti tukang besi dan nelayan, sehingga mereka hanya ingin meneruskan keahlian itu di daerah baru.

Sebab masing-masing kelompok pendatang menonjolkan keahlian yang dibawa dari kampung halaman, bukan untuk menjadi pemimpin di negeri orang ataupun bekerja di luar keahliannya, maka para pendatang inipun mendaulat Raja Pati Pelang agar bersedia menjadi pemimpin mereka sesuai kharisma

7) Sosok Raja Pati Pelang sangat dihormati dan diutamakan oleh masyarakat Lamahala.

yang dimilikinya. Namun di luar dugaan, jawaban Raja Pati Pelang sama dengan jawaban yang diberikan oleh pendatang lainnya dalam merespons tawaran tersebut, karena Raja Pati Pelang pun menolak tawaran menjadi pemimpin. Alasan beliau untuk menolak amanah menjadi pemimpin, prinsipnya sama dengan alasan yang diberikan oleh kelompok masyarakat lain yang datang ke Lamahala. Menurut Raja Pati Pelang, ia yang datang dari negeri jauh juga sudah mempunyai keahlian tersendiri.

Sesungguhnya, daulat sebagai pemimpin dari Raja Pati Pelang sangat diharapkan oleh para pendatang yang bermukim di Lamahala. Oleh karena para pendatang dan Raja Pati Pelang tidak ada yang bersedia menjadi pemimpin, akhirnya, tawaran menjadi pemimpin pun diserahkan kepada orang Adonara sendiri, yaitu kelompok masyarakat yang berasal dari Gunung Kamolu. Tawaran menjadi pemimpin itu diterima dan disepakati oleh peserta yang berkumpul, sebab mereka yang dipilih itu merupakan putra dari Pulau Adonara sendiri sehingga lebih pantas dan lebih berhak menjadi pemimpin.

Kelompok masyarakat yang berasal dari Gunung Kamolu ini sudah terlahir sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, kesepakatan untuk menyerahkan pimpinan kepada mereka adalah pilihan yang tepat. Dalam struktur masyarakatnya, kelompok masyarakat dari Gunung Kamolu ini memiliki tiga suku besar yaitu Atapukan, Malakalu, dan Selolong. Ketiga kelompok suku ini terlahir dari orang tua yang sama, akan tetapi satu sama lain memiliki bidang tugas dan keahlian yang berbeda-beda. Bolimalakalu dari Suku Malakalu, atas kesepakatan ketiga suku menunjuknya sebagai pemimpin pertama. Dalam perjalanan kepemimpinan Bolimalakalu ini, beliau membentuk struktur pemerintahan dalam tatanan adat di mana tiga suku besar itu disebut *bela suku telo* (tiga pemimpin utama dan utama). Dalam menjalankan kepemimpinannya, mereka dibantu oleh sepuluh kapitan, yang dalam bahasa adat disebut *kapitan pulo*,⁸ bertugas untuk

8) Suku yang ada di Desa Lamahala lebih kurang 40 suku. Sebagian dari suku-suku tersebut tidak berkembang

menciptakan hubungan langsung dengan masyarakat, dan lima pegawai *leman* bertugas dalam urusan kerohanian.

Kembali kepada keahlian masing-masing suku, tongkat kepemimpinan sebagai raja diserahkan kepada Suku Selolong untuk melanjutkan urusan pemerintahan yang sudah ada. Sementara untuk saudaranya dari Atapukan diberi tugas mengurus adat dan Bolimalakalu bertindak sebagai panglima perang. Sejak Bolimalakalu berkedudukan sebagai panglima perang, ia pun menjelajah seluruh daerah sekitar dan menghimpun kerajaan-kerajaan di sekitarnya untuk membangun sebuah kehidupan yang disebut dengan Kerajaan Islam Solor Lima Pantai.

C. Ekologi Budaya Desa Lamahala

Secara sederhana, ekologi budaya (*cultural ecology*) didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan di mana budaya digunakan oleh manusia untuk beradaptasi terhadap lingkungannya (Sutton dan Anderson, 2004: 3). Interaksi manusia dengan lingkungannya sangat penting dimaksudkan agar manusia itu dapat tinggal dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan di mana ia tinggal, baik perubahan yang timbul akibat fenomena alam maupun perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Dalam tulisan ini, Desa Lamahala menjadi lingkungan tempat orang-orang Lamahala hidup dan beraktivitas, termasuk untuk mengekspresikan kebudayaannya. Di desa ini pula mereka beradaptasi agar lingkungan yang mereka tempati dapat menerimanya. Walaupun lingkungan baru yang mereka diami dapat diasumsikan sama, namun karena para pendatang yang berada di Desa Lamahala berasal dari latar belakang budaya yang berbeda maka adaptasi yang dilakukan

sehingga ada suku yang bergabung dengan suku-suku lain. Apakah dimungkinkan menggabungkan satu suku dengan suku lain, masih menjadi pertanyaan? Suku-suku di Desa Lamahala yang disebut *kapitan pulo* adalah Gorag, Lamuran, lambuan, atamua, lamuda, utun, bunga lolong, atabetah, lamalaka, lamarian, bel an, paraone, seran, wanda, lamakeluan, lowonta, heringbuhir, boleng, sina, lamalewa, bahi, lewaha (arti: kampung pertama).

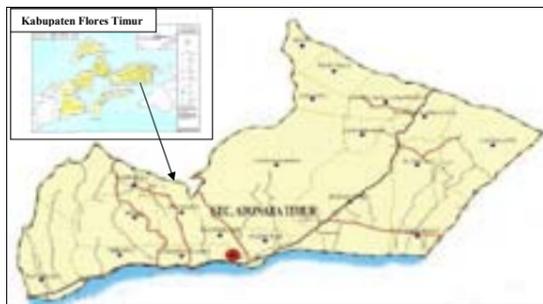
oleh orang Lamahala itupun berbeda pada masa itu. Perbedaan itu juga tampak dari jenis pekerjaan yang ditekuni ketika awal pertama penduduk Lamahala bermukim di desa ini. Kondisi masyarakat Lamahala yang ada sekarang merupakan hasil dari proses adaptasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk senantiasa berada pada keseimbangan baru.

Kini, Desa Lamahala merupakan salah satu desa di antara 20 desa dan satu kelurahan di wilayah Kecamatan Adonara Timur.⁹ Wilayah Adonara Timur itu dibagi menjadi 21 desa/kelurahan terdiri dari 3 desa pesisir dari tiga desa yang dikategorikan sebagai desa pesisir dan 1 kelurahan pesisir, sementara 17 desa lainnya bukan desa pesisir (lihat Gambar 1). Desa Lamahala pun merupakan salah satu desa yang termasuk bagian dari kecamatan ini. Desa yang menghadap Selat Solor ini luasnya 1,67 kilometer persegi (km²) atau sekitar 1,53% dari luas wilayah kecamatan yang mencapai 108,94 km². Jumlah penduduk desa tahun 2007 mencapai 5.440, adalah bagian dari penduduk Kecamatan Adonara Timur yang berjumlah 25.508 jiwa. Jumlah penduduk yang bermukim di Desa Lamahala sekitar 21,33% dari seluruh jumlah penduduk Adonara Timur. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak maka tingkat kepadatan penduduk terhadap wilayahnya sangat tinggi yaitu 3.317 jiwa per

9) Kecamatan Adonara Timur berada di Pulau Adonara. Luas pulau ini 509 km² sehingga dengan luas wilayah yang demikian, Pulau Adonara termasuk pulau kecil merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Bab 3 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tersebut dijelaskan bahwa batasan dan karakteristik pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut: a. Pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 orang; b. Secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas, dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular; c. Mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; d. Daerah tangkapan air (*catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut; e. Dari segi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pulau-pulau bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya. Desa yang menjadi wilayah Kecamatan Adonara Timur adalah Terong, Lamahala Jaya, Waiburak, Lamatwelu, Dawataa, Terong, Bilal, Narasaosina, Tapobali, Karing Lamalouk, Tuawolo, Kiwang Ona, Lewobunga, Beloto, Ipi Ebang, Lamalota, Gelong, Kwaelaga Lamawato, Huhu, Saosina, Lelenbala, dan Kelurahan Waiwerang yang sekaligus ibukota kecamatan tersebut (Kantor Camat Adonara Timur, 2011).

km². Padahal, tingkat kepadatan penduduk untuk tingkat kecamatan hanya 234 jiwa per km². Artinya, tingkat kepadatan penduduk Desa Lamahala jauh di atas kepadatan penduduk di tingkat kecamatan, sehingga yang tampak seakan tidak ada wilayah desa Lamahala tanpa didiami oleh orang Lamahala. Fenomena itu juga terlihat dari permukiman yang begitu padat dan berlapis antara satu rumah dengan rumah lain.

Gambar 1
Peta Kecamatan Adonara Timur



Penduduk yang bermukim di daerah pesisir ataupun tidak mempunyai istilah tersendiri dalam mengidentifikasi permukiman mereka. Penduduk yang bermukim di pesisir disebut orang *watan* (orang pesisir atau pantai). Sebaliknya, mereka yang bermukim di wilayah bukan pesisir disebut orang *kiwang* (orang gunung). Mata pencaharian mereka yang tinggal di pesisir mayoritas nelayan dan yang bermukim di luar pesisir lebih banyak bertani. Dalam perkembangannya, istilah *watan* dan *kiwang* yang tadinya hanya bermakna mengidentifikasi tempat bermukim penduduk, yaitu antara pesisir dan bukan pesisir (gunung) bergeser menjadi alat untuk mengidentifikasi agama yang dianutnya, yaitu antara Islam dan Kristen. Hal ini didasarkan pada agama mayoritas yang dianut oleh penduduk yang bermukim di dua wilayah permukiman yang berbeda itu, sehingga identitas agama untuk terminologi *watan* untuk orang pesisir dan *kiwang* untuk orang non-pesisir pun melekat. Mereka yang bermukim di daerah pesisir mayoritas beragama Islam dan penduduk yang tinggal di daerah bukan pesisir (gunung)

mayoritas beragama Kristen. Oleh karena itu, dapat juga disebutkan bahwa orang *watan* adalah Islam dan orang *kiwang* adalah Kristen, walaupun pengidentikan itu tidak selalu benar.

Walaupun ada tempelan identitas baru melalui terminologi *watan* dan *kiwang* yang diidentikkan dengan segregasi berdasarkan agama, segregasi itu tidak mampu membuat suasana damai dan toleransi yang dimiliki oleh penduduk Adonara Timur menjadi keruh. Dengan adanya hubungan kawin-mawin antara penduduk yang saling berbeda agama (biasanya perempuan sebagai calon istri yang mengikuti agama yang dianut oleh laki-laki yang menjadi calon suami) dan semakin banyaknya penduduk yang beragama Islam yang bermukim di daerah gunung akibat lahan permukiman yang semakin terbatas di wilayah pesisir, mengakibatkan pemaknaan baru dari terminologi *watan* dan *kiwang* yang merujuk pada identitas agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Adonara Timur menjadi tidak lagi relevan.

Terlepas dari itu, berdasarkan istilah di atas dengan mudah sebenarnya dapat diidentifikasi bahwa penduduk yang bermukim di daerah pesisir mayoritas beragama Islam, bahkan di desa tertentu seperti Desa Lamahala Jaya, penduduknya 100% menganut agama Islam. Sebaliknya, penduduk yang bermukim di daerah gunung mayoritas beragama Khatolik. Walaupun daerah pesisir hanya 4(empat) desa di Kecamatan Adonara Timur sementara non-pesisir sebanyak 17 desa, tetapi dari komposisi penduduk ternyata jumlah penduduk yang beragama Islam justru lebih banyak dibandingkan dengan penduduk beragama Kristen. Jumlah penduduk beragama Islam sekitar 13.415 jiwa dan yang beragama Kristen 12.859 jiwa (Katolik 12.717 jiwa dan Protestan 142 jiwa). Realitas ini mengindikasikan bahwa tingkat kepadatan penduduk di daerah pesisir jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepadatan penduduk di luar daerah pesisir. Fenomena itu terlihat dari tingkat kerapatan permukiman yang juga begitu tinggi sehingga ruang-ruang terbuka seperti keberadaan halaman rumah di daerah pesisir ini merupakan sesuatu yang mahal.

Sementara suku yang mendiami Kecamatan Adonara adalah 98% berasal dari suku Adonara walaupun asal-usul mereka sesungguhnya berasal dari berbagai daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya dan 1,9% merupakan Solor dan sisanya adalah Jawa, Padang, dan Bugis. Permukiman yang tersegregasi berdasarkan agama yang dianut tidak berarti kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Adonara Timur ini ikut terpisah. Mereka secara bersama-sama melaksanakan aktivitas sosial dan ekonomi. Kenyataan itu didasarkan pada kesadaran bahwa penduduk yang berlainan agama itu berasal dari suku yang sama ditambah dengan adanya perkawinan yang sudah kawin-mawin antarpenduduk yang berbeda agama tersebut. Oleh karena itu, anggota keluarga yang keluar ataupun masuk akibat terjadi perpindahan agama melalui perkawinan merupakan sesuatu yang biasa. Toleransi dan saling membantu antara mereka yang saling berbeda agama akan selalu dijumpai.

D. Nelayan dan Aktivitasnya

Nelayan adalah aktivitas utama masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, yaitu masyarakat yang bermukim di tiga desa pesisir; Terong, Lamahala Jaya, dan Waiburak. Aktivitas kenelayan sudah ada sejak nenek moyang mereka dulu dan berlangsung sampai kini secara turun-temurun. Transfer pengetahuan dari generasi ke generasi selanjutnya berlangsung secara alami. Anak-anak nelayan yang masih usia sekolah ada yang dibawa oleh orang tuanya ikut mencari ikan di tengah laut. Dengan seringnya mereka dibawa melaut dan melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang tua dan anak buah kapal (ABK), maka pengetahuan untuk menangkap ikan dan keberanian mengarungi samudra akan timbul dengan sendirinya.

Nelayan Lamahala menangkap ikan di perairan Laut Sawu dan perairan sekitarnya. Laut Sawu ini menjadi habitat ikan-ikan besar termasuk mamalia laut seperti paus yang menjadi salah satu biota tangkapan masyarakat

di Desa Lamalera dan Lamakera.¹⁰ Laut Sawu dari Desa Lamahala dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi untuk sampai ke sana, nelayan Lamahala terlebih dahulu menelusuri Selat Lamakera, terus berbelok ke arah timur untuk kemudian haluan perahu diarahkan ke selatan menyeberangi Selat Lamakera, yang panjangnya kurang lebih satu kilometer dan selanjutnya tiba di Laut Sawu yang terkenal dengan ombaknya yang ganas.

Laut Sawu dapat disebut sebagai *fishing ground* (wilayah penangkapan) yang paling jauh bagi nelayan Lamahala. Oleh karena laut ini seakan tidak bertepi sehingga nelayan yang mencari ikan di wilayah laut tersebut harus waspada agar ketika nelayan sedang menangkap ikan, mereka tidak terbawa arus semakin jauh, yang memungkinkan mereka bisa sampai di perairan Australia. Selain Laut Sawu, daerah tangkapan nelayan adalah perairan laut di sekitar mereka; ke arah barat Selat Larantuka, ke arah timur merupakan Selat Boleng, dan ke arah selatan adalah Selat Solor terus dapat berbelok ke Selat Lamakera dan selanjutnya menuju Laut Sawu.

Apabila nelayan Lamahala mencari ikan di Laut Sawu, patokan yang diperhatikan agar tidak semakin menjauh karena dikhawatirkan akan tersesat adalah gunung yang sudah dikenal dan berada di sekitar mereka. Sepanjang puncak gunung yang ada di sekitar mereka masih terlihat, perjalanan untuk menangkap ikan masih dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila puncak gunung sudah tidak kelihatan dari tengah laut maka haluan kapal sudah harus berbalik arah. Pentingnya puncak gunung untuk memantau perjalanan yang ditempuh apakah sudah jauh atau belum, disebabkan puncak gunung itu menjadi kompas yang berfungsi memandu pelayaran yang dilakukan nelayan untuk menggantikan kompas yang tidak mereka miliki.

Potensi ikan di perairan laut yang mengelilingi Desa Lamahala ini sesungguhnya sangat tinggi. Hal itu dipengaruhi dengan

¹⁰) Kegiatan nelayan Lamalera dengan tradisi menangkap paus dapat dilihat dalam tulisan Siburian dan Lumbanbatu, "Nelayan dan Perburuan Paus di Desa Lamalera: Antara Mempertahankan Tradisi dan Upaya Konservasi Laut Sawu", dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 11 No. 1 Maret 2012. Hlm.: 1-17.

adanya fenomena alam berupa pertemuan dua arus bawah dari Laut Flores dan Laut Sawu. Dalam pemahaman masyarakat setempat, ada dua arus laut yang mereka tahu berada di sekitar perairan laut mereka; arus *wataowako*, yaitu arus yang terdapat di Selat Solor; dan arus *gonsalo*, yaitu arus yang terdapat di selat yang berada antara Pulau Flores dan Pulau Adonara.¹¹ Pertemuan arus bawah ini menimbulkan gerakan naiknya massa air dari lapisan bawah ke arah permukaan yang dikenal dengan *upwelling*. Oleh karena itu, perairan yang subur itu merupakan tempat berkumpulnya berbagai ikan dan menjadi tempat nelayan Lamahala untuk menangkap ikan atau *fishing ground* (larantuka2009.blogspot.com). Perairan yang kaya akan unsur hara yang menjadi sumber makanan berbagai plankton¹² menimbulkan dugaan kuat sebagai penyebab bermigrasinya paus dari Samudra Pasifik sekitar bulan Mei sampai Oktober untuk mencari makanan, sekaligus untuk menghindari musim dingin yang berlangsung di wilayah itu.

Berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan nelayan, *purse seine* merupakan jenis alat tangkap yang dominan dibandingkan dengan pukat tarik. *Purse seine* adalah alat tangkap berbentuk kantong dilengkapi dengan cincin dan tali *purse line* yang terletak di bawah tali ris. Fungsi tali ris ini adalah untuk menyatukan bagian bawah jaring sewaktu beroperasi dengan cara menarik tali *purse line* tersebut agar jaring membentuk kantung. Alat penangkapan ikan *purse seine* ini termasuk dalam klasifikasi pukat kantong (Nedelec, 2000). Data 2007 menunjukkan bahwa jenis alat tangkap *purse seine* yang digunakan nelayan Lamahala berjumlah 81 unit, pukat tarik 26 unit, dan *gillnet mono* 5 unit. Sementara nelayan yang menggunakan pancing untuk menangkap ikan tidak ada walaupun itu merupakan jenis alat tangkap ikan (Kecamatan Adonara Timur, 2007).

Pada umumnya, jumlah hari rata-rata nelayan turun ke laut untuk menangkap ikan

11) Hasil wawancara dengan masyarakat setempat, 25 Juli 2011.

12) Plankton adalah sejenis mikroorganisme yang hidup di perairan dan merupakan sumber makanan bagi kehidupan akuatik seperti ikan.

adalah 25 hari dalam sebulan. Sementara pada saat bulan purnama, nelayan tidak turun ke laut. Ketika nelayan tidak melaut, mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbaiki jala yang mungkin robek, menambal perahu karena bocor, mencat lambung kapal yang sudah mengelupas, atau mengurus lahan pertanian kalau di antara nelayan ada yang memiliki lahan pertanian. Sementara alasan nelayan tidak melaut ketika bulan bersinar terang (purnama) karena cahaya bulan tersebut menembus beberapa meter di bawah permukaan air laut yang mengakibatkan ikan-ikan tidak naik ke permukaan. Ikan-ikan yang ada jauh di dalam permukaan tidak mampu dijangkau oleh jaring nelayan sehingga sia-sia kalau nelayan memaksakan diri melaut karena hasil tangkapan tidak ada, dan pada saat itu pun arus laut relatif kencang. Kendati demikian, nelayan yang turun ke laut tidak saja pada malam hari tetapi juga di siang hari. Jenis ikan yang ditangkap pada siang hari antara lain ikan tongkol. Pada siang hari, jenis ikan ini sering naik ke permukaan air secara berkelompok. Ketika nelayan melihat kumpulan ikan tersebut naik ke permukaan laut dari kejauhan, mereka pun dengan sesegera mungkin turun ke laut dengan alat tangkapnya.

Ikan hasil tangkapan nelayan dari Kecamatan Adonara Timur dari sisi kuantitas relatif besar, namun tidak dari sisi kualitas. Pada tahun 2007 sendiri, volume ikan yang ditangkap mencapai 2.869.684 ton terbagi dalam dua jenis ikan, yaitu jenis ikan pelagis¹³ sekitar 2.808.067 ton dan jenis ikan demersal¹⁴ berjumlah 1.617 ton (Lihat tabel). Hanya saja, jenis ikan pelagis sekitar 40% didominasi oleh ikan tembang yang harganya relatif murah,

13) Ikan jenis pelagis (*pelagic fish*) adalah ikan yang memiliki minyak di jaringan tubuh mereka dan dalam rongga perut di sekitar usus. Contoh ikan jenis pelagis adalah tenggiri, marlin, wahoo, tuna, sarden, salmon, trout, ikan teri, layur, lamadang, cendro, julung, tembang, kembung, tongkol, cakalang, selar, tunai, dan layang, dan bara kuda.

14) Ikan jenis demersal adalah jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, dapat dikatakan juga bahwa ikan demersal adalah ikan yang tertangkap dengan alat tangkap ikan dasar seperti trawl dasar (*bottom trawl*), jaring insang dasar (*bottom gillnet*), rawai dasar (*bottom long line*), bubu dan lain sebagainya. Contoh ikan jenis ini antara lain biji nangka, lencam, napoleon, baronang, kakap merah, belamak, kurisi, kerapu, pisang, peperek, manyung, kurisi, kuniran, tiga waja, dan bawal.

yaitu sekitar Rp 5.000 untuk satu ember besar penuh (lebih kurang 20 kg). Hasil tangkapan yang didominasi ikan tembang tidak justru membahagiakan nelayan karena harganya yang murah. Ketika hasil tangkapan melimpah, ikan tembang banyak yang dibuang, bahkan orang gunung yang membeli ikan tembang ini bukan untuk mereka konsumsi tetapi dijadikan sebagai pakan ternak babi. Ikan jenis ini berukuran kecil dengan panjang hanya 10 centimeter saja. Sementara jenis ikan demersal, volume tangkapan relatif sama kecuali untuk jenis napoleon, kakap merah, dan belamak yang jumlahnya di bawah 100 ton (Kantor Camat Adonara Timur, 2007).

Tabel Perkiraan Produksi Ikan Menurut Jenisnya Tahun 2007 Kecamatan Adonara Timur

No	Jenis Ikan	Jumlah	Persentase
A.	Ikan Pelagis	(Ton)	(%)
1.	Layur	18	0,00
2.	Lamadang	81	0,00
3.	Cendro	235	0,00
4.	Jukung	345	0,01
5.	Tembang	871.972	31,05
6.	Kembung	291.660	10,39
7.	Tongkol	401.129	14,28
8.	Cakalang	26.229	0,93
9.	Selar	527.991	18,80
10.	Tuna	244	0,00
11.	Layang	504.188	17,95
12.	Lain-lain	183.975	6,55
	Jumlah A	2.808.067	99,94
B.	Ikan Demersal		
1.	Biji Nangka	223	13,79
2.	Lencam	123	7,61
3.	Napoleon	43	2,66
4.	Beronang	228	14,10
5.	Ikan merah	98	6,06
6.	Belamak	21	1,30
7.	Kurisi	120	7,42
8.	Kerapu	130	8,04
9.	Pisang	375	23,19
10.	Lain-lain	256	15,83
	Jumlah B	1.617	0,06
	Total A + B	2.809.684	100,00

Sumber: Kantor Camat Adonara Timur, 2011.

Nelayan di Lamahala tidak semua pemilik kapal sehingga di antara mereka ada yang menjadi nelayan atau biasa disebut anak buah kapal (ABK). Untuk satu unit kapal

biasanya diikuti antara 4 sampai 6 ABK. Kendati demikian, tidak semua masyarakat Adonara berprofesi sebagai nelayan, bahkan ada di antara penduduk yang dulunya bekerja sebagai nelayan beralih menjadi *balawaeng* (juragan) atau sang pemilik kapal yang tidak pergi melaut.

ABK dalam sistem pengupahan di Lamahala tidak diberlakukan sebagai pekerja tetapi mereka adalah mitra. Oleh karena itu, ABK yang turun ke laut tidak diupah selaku pekerja. Pendapatan mereka tergantung pada jumlah ikan yang berhasil mereka tangkap. Semakin banyak jumlah ikan yang ditangkap maka semakin besar pula hasil yang mereka peroleh, dan sebaliknya kalau hasil tangkapan kosong maka hasil yang bisa dibawa pulang pun menjadi nihil. Dalam sistem bagi hasil ini, biaya pada saat melaut yang biasa ditanggung oleh pemilik kapal dihitung sebagai modal kerja yang harus dibayar terlebih dahulu dari hasil tangkapan saat itu. Hasil dari pengurangan biaya ini kemudian dibagi dua sama besar; 50% untuk pemilik kapal dan 50% dibagi oleh seluruh ABK.

Berdasarkan jenis dan volume ikan hasil tangkapan nelayan Lamahala, mereka belum berorientasi ekspor. Hasil tangkapan sekedar untuk memenuhi pasar lokal, baik yang ada di Adonara sendiri maupun Larantuka. Dalam hal ini, Larantuka sebagai ibukota Kabupaten Flores Timur menjadi pasar bagi ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Lamahala. Hal itu didukung juga oleh keberadaan 2(dua) unit tempat pelelangan ikan (TPI) yang ada di sana. Setelah sampai di TPI tersebut, perjalanan ikan tangkapan nelayan Lamahala tidak lagi mereka ketahui. Selain dijual ke Larantuka, ikan tangkapan nelayan pun ada yang dijual di tengah laut. Transaksi di tengah laut ini dilakukan di atas kapal-kapal penampung yang sengaja datang ke perairan di sekitar Pulau Adonara. Sementara pengolahan ikan untuk diekspor ke luar negeri belum ada di Lamahala. Nelayan Lamahala belum dapat melihat peluang pasar ekspor padahal jumlah nelayan di Kecamatan Adonara Timur relatif banyak. Berbeda dengan nelayan yang ada di Atambua, beberapa orang nelayan sekaligus

pengusaha ikan sudah memanfaatkan pasar ekspor untuk memasarkan ikan-ikan yang mereka tangkap. Konsekuensinya adalah ikan hasil tangkapan nelayan Atambua (Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur) ini didominasi ikan-ikan besar sehingga areal tangkapan pun lebih ke tengah (laut dalam).

Ikan hasil tangkapan nelayan tidak semuanya dijual baik langsung ke TPI maupun transaksi yang dilakukan di tengah laut. Ikan sebagian disisakan untuk dijual di Adonara Timur melalui ibu-ibu pedagang yang sudah menunggunya di tepi pantai di Adonara Timur. Ibu-ibu pedagang ini kemudian menjual ikan-ikan itu di pasar kecil yang berlangsung setiap sore hari dan pasar besar yang berlangsung setiap hari Selasa. Kalau setiap sore, ikan yang dijual di pasar yang berada di pinggir jalan ini adalah untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Kecamatan Adonara Timur saja, sementara ikan yang dijual di pasar besar adalah untuk dikonsumsi oleh pembeli yang datang dari seluruh Kecamatan Adonara Timur dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Lambata, Flores Timur dan Solor. Selain dijual di pasar, ikan pun ada yang dijual oleh ibu-ibu tersebut dengan berkeliling masuk-keluar kampung yang ada di pedalaman. Ibu-ibu yang menjual ikan masuk-keluar kampung ini disebut dengan istilah "pembakul ikan". Kalau ibu-ibu membeli ikan dari nelayan sekitar Rp 5.000 per kilogram, kemudian mereka menjualnya di pasar dengan harga Rp 7.500 per kilogram. Sementara kalau ikan dijual di kampung-kampung, hitungannya bukan per kilogram tetapi per ekor. Jumlah ikan yang dibawa berkeliling kampung sekitar 60 kilogram.

Nelayan yang ada di Kecamatan Adonara di atas kertas tergabung dalam beberapa kelompok nelayan. Kelompok nelayan yang tercatat di Kantor Camat Adonara Timur hingga tahun 2011 sekitar 23 kelompok. Lokasi kelompok nelayan kebanyakan berada di Desa Lamahala Jaya. Kelompok nelayan yang terdapat di Desa Lamahala Jaya tersebut adalah Gurael Petata, Ampera, Fajar Muda, Agung Abadi, Lopo Gedor, Putra Bahi, Fajar, Lamuda BL, Nara Jaya, Pantai Harapan, Bao Dai, Gelekat Ata, Puken Gere, dan Bote Lewo.

Sementara kelompok nelayan yang berlokasi di Desa Waiburak ada 6(enam) yaitu Dore Dai, Andita, Arung Bahari, Nimba Bahari, Laut Sawu, Boleng Sare; Desa Terong, Beloto, dan Kelurahan Wawerang masing-masing satu kelompok bernama Pantai Dua, Gita Bahari, dan Waiwerang Indah (Kantor Camat Adonara Timur, 2011). Walaupun jumlah kelompok nelayan relatif banyak, namun ketika konfirmasi di lapangan dilakukan ternyata tidak semua kelompok nelayan itu aktif. Kelompok nelayan Gurael Petata yang berdiri tahun 2005 misalnya, ternyata sejak tahun 2009 sudah tidak aktif akibat masalah internal yang ada dalam kelompok, terutama disebabkan tanggung jawab anggota kelompok yang rapuh. Uang kas kelompok yang dipinjam anggota tidak dikembalikan secara teratur sesuai perjanjian, bahkan tidak sedikit pinjaman anggota yang macet. Selain itu, iuran wajib anggota tidak diserahkan anggota kelompok sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, bahkan ada di antara anggota yang tidak mau membayarnya.

Pembentukan kelompok nelayan di Desa Lamahala khususnya dan Kecamatan Adonara Timur pada umumnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, untuk memenuhi syarat yang diajukan pemerintah agar dapat menerima bantuan. *Kedua* adalah sarana tolong-menolong. Tujuan pertama dicapai dengan membuat proposal perihal permohonan bantuan dana yang diajukan kepada pemerintah. Dalam hal ini, seseorang mengumpulkan para nelayan untuk membentuk kelompok nelayan sebagai syarat untuk memperoleh bantuan. Akan tetapi, beberapa nelayan yang dikumpulkan untuk membentuk kelompok dengan menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti keanggotaan, ternyata ada yang hanya formalitas saja. Ketika bantuan diterima oleh kelompok, ternyata bantuan itu hanya dinikmati oleh pembuat proposal saja dalam hal ini ketua kelompok. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli peralatan kenelayan seperti kapal *boat* dan mesinnya termasuk untuk pertanggungjawabannya kepada pemberi bantuan. Anehnya, walaupun anggota kelompok mengetahui penggunaan bantuan yang hanya dinikmati oleh satu orang

saja, nelayan yang sudah berkontribusi untuk memperoleh bantuan melalui kesediaan menjadi anggota kelompok tidak berkeberatan ataupun mempermasalahkannya. Alasan yang diberikan bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut termasuk tidak dibebankan dalam pengembaliannya sehingga ia tidak merasa dirugikan. Orang yang mengembalikan bantuan yang diperoleh itu hanya bagi mereka yang menerima saja. Sementara tujuan kedua tercapai setelah kewajiban sebagai anggota dengan memberikan uang pangkal dan uang iuran dilaksanakan, karena dengan demikian ia pun berhak untuk meminjam dana kelompok apabila yang bersangkutan memerlukannya.

E. Nelayan, Perubahan, dan Kekhawatirannya

Dalam aktivitas kenelayan di Desa Lamahala telah terjadi perubahan yang drastis dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perubahan itu terjadi pada penggunaan alat tangkap seperti jaring dan perahu. Alat tangkap tidak lagi menggunakan kapal dayung tetapi sudah kapal bermesin. Kemudian, jaring tidak lagi menggunakan tali *gebang* yang terbuat dari daun lontar tetapi sudah menggunakan benang yang dikenal dengan pukat pesaing. Penggunaan tali *gebang* ini berakhir sekitar tahun 1974.

Sebelum ada modernisasi terhadap alat tangkap, nelayan ketika menghalau kapal ke tengah laut masih menggunakan tenaga manusia. Tenaga manusia untuk mendayung satu unit kapal sekitar 20 orang. Tenaga pendayung ini banyak yang didatangkan dari luar Lamahala seperti Larantuka, Lembata, dan Lamakera. Oleh karena alat tangkap terdahulu sangat sederhana yang berakibat terbatasnya daerah jangkauan, kondisi itu berdampak pada rendahnya volume ikan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, jaring yang digunakan untuk menangkap ikan terbuat dari tali *gebang* berbahan daun lontar, tingkat kekuatannya relatif rendah dan tidak tahan dalam waktu lama. Hal itu akibat tali *gebang* setelah digunakan harus dijemur yang mengakibatkan tali *gebang*

tersebut menjadi rapuh. Pada saat tali *gebang* kembali digunakan untuk menangkap ikan, tali tersebut sering robek yang mengakibatkan ikan yang sudah masuk perangkap banyak yang lepas. Kemudian kelemahan lain, kapal yang didayung membutuhkan tenaga manusia untuk mendayungnya. Agar laju kapal nelayan lebih cepat dibutuhkan tenaga pendayung yang lebih banyak. Akan tetapi, manusia memiliki tenaga yang terbatas sehingga daerah jangkauan menjadi terbatas pula.

Dengan adanya kapal modern, maka tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan untuk mendayung dan pukat pesaing pun dapat bertahan lebih tahan lama dengan ukuran yang lebih panjang. Panjang pukat yang digunakan nelayan Lamahala dalam menangkap ikan dapat mencapai 138 *depa* (1 *depa* sekitar 160 cm) dan lebar 30 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk memasang pukat bentuk melingkar ini sekitar 1,5 jam. Persoalan nelayan yang muncul adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaut menjadi lebih besar terutama untuk keperluan bahan bakar. Menurut juragan nelayan HS (52 tahun), biaya turun ke laut menggunakan kapal berukuran 10 GT yang mampu memuat sekitar 10 ton ikan berkisar antara Rp 150.000 sampai Rp 300.000 sekali jalan. Biaya tersebut digunakan untuk membeli minyak solar sebanyak 40 liter bagi tiga unit mesin kapal. Sementara pada waktu dulu, biaya melaut hanya untuk membeli konsumsi ABK, sebaliknya dengan menggunakan mesin bermotor, biaya yang dikeluarkan minimal untuk pengadaan bahan bakar.

Pengadaan bahan bakar merupakan biaya yang mendominasi aktivitas nelayan dan biaya tersebut harus dikeluarkan walaupun hasil tangkapan nihil. Mengingat hasil tangkapan tidak selalu banyak bahkan tidak jarang hasil tangkapan itu nihil, mengakibatkan mahalnya biaya pengadaan bahan bakar tersebut sering menjadi keluhan nelayan tidak saja di Desa Lamahala tetapi juga nelayan di tempat lain. Sementara ketika nelayan hanya mengandalkan tenaga manusia untuk menghalau perahu ke tengah laut, maka apabila hasil tangkapan nihil biaya yang dikeluarkan relatif tidak ada kecuali tenaga yang terkuras dan konsumsi seadanya.

Kekhawatiran nelayan dalam usaha penangkapan ikan ke depannya adalah dampak dari maraknya penggunaan bom untuk menangkap ikan. Para pengguna bom itu adalah nelayan yang berasal dari desa lain namun daerah tangkapan sama dengan nelayan Lamahala. Jumlah tangkapan nelayan yang menggunakan bom ini relatif banyak tetapi kondisi itu hanya berlangsung sebentar saja. Dampak penggunaan bom akan memusnahkan seluruh biota dalam ekosistem laut sehingga potensi isi laut ke depan akan semakin berkurang. Kalau itu yang terjadi, proses pemiskinan nelayan pun terus berlanjut, dan kemungkinan justru lebih parah dibandingkan dengan kondisi saat ini karena diikuti faktor lain seperti pemanasan global dan tekanan jumlah penduduk yang terus bertambah.

Masalah penggunaan bom ini sesungguhnya sudah disampaikan ke pemerintah daerah dan berpuncak ketika para nelayan dari Adonara Timur berdemonstrasi di Selat Solor pada tahun 2010. Aksi itu tidak berhenti di Selat Solor saja tetapi berlanjut sampai di depan Kantor Polres Adonara Timur. Akan tetapi, demonstrasi di Kantor Polres itu tidak membuahkan hasil akibat kurangnya koordinasi di masing-masing instansi pemerintah itu. Sesungguhnya, sebelum demonstrasi dilakukan komunikasi dengan nelayan dari pulau tetangga sudah ada, hanya saja komunikasi itu tidak mencapai titik temu. Kelompok nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan beralasan bahwa mereka ingin hidup.

Kalau disadari, nelayan yang mata pencahariannya berasal dari sumberdaya laut, maka penggunaan bom untuk menangkap ikan merupakan perusakan pada ekosistem itu sekaligus memusnahkan sumber mata pencahariannya. Penggunaan bahan peledak (*dynamite*) berdampak serius terhadap kondisi terumbu karang, karena daya ledaknya merusak secara fisik terumbu karang dan mempengaruhi kesehatan organisme yang berasosiasi dengan karang tersebut. Pengaruh negatif dari daya ledak bom mencapai radius 75 meter dari pusat ledakan, dengan luas mencapai 25 hektar dan volume air yang terkontaminasi pada saat ledakan mencapai 2

juta meter kubik (Murdiyanto, 2003 dikutip oleh Pulungan Tt).

Jika nelayan lain masih terus menggunakan bom untuk menangkap ikan sementara nelayan Lamahala tidak menggunakannya, menunjukkan bahwa orientasi kedua nelayan dalam memandang sumberdaya laut berbeda. Kondisi itu dapat menjadi pemicu munculnya benturan di antara nelayan yang dapat berujung pada konflik horizontal, yaitu di antara kelompok sesama masyarakat Lamaholot ini. Merujuk pemikiran Charles (1992 dikutip oleh Supriadi dan Indrawasih, 2006: 5), pola konflik dapat muncul terkait dengan alokasi internal (*internal allocation*), di mana konflik muncul sebagai akibat interaksi antara *stakeholder* yang terlibat dalam usaha perikanan; antara lain konflik antara kelompok nelayan dengan latar belakang geografis, kultur, atau alat tangkap yang berbeda.¹⁵

Perubahan lain yang terjadi adalah orientasi pekerjaan anak muda dari Desa Lamahala sudah mulai beralih dari laut. Akhir-akhir ini, nelayan yang masih setia dengan kegiatannya relatif sulit untuk mendapatkan anak buah kapal untuk diajak turun ke laut. Generasi muda dari desa ini lebih memilih menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri seperti Malaysia. Oleh karena itu, tidak heran kalau warga dari desa ini khususnya dan Pulau Adonara umumnya banyak yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Kalaupun generasi muda ada yang tetap tinggal di Desa Lamahala, mereka lebih memilih bekerja di sektor informal lain. Penghasilan dari pekerjaan di sektor informal seperti tukang ojek dianggap lebih menjanjikan. Penghasilan tukang ojek dalam sehari dapat mencapai Rp 70.000 sampai Rp 80.000,

¹⁵ Pola konflik kenelayan yang lain menurut Charles ini adalah; 1) *conflict of jurisdiction*, yaitu konflik yang muncul terkait pengaturan pihak yang memiliki dan menguasai akses terhadap sumber daya, rezim seperti apa yang akan mengoptimalkan pengelolaan dan peran pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya laut; 2) *management mechanism*, yaitu konflik yang muncul terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, misalnya adanya pelanggaran aturan zonasi pengoperasian alat tangkap dan pengambilan sumberdaya melebihi quota yang sudah ditetapkan; 3) *external allocation conflict*, yaitu konflik yang muncul akibat adanya interaksi antara *stakeholders* yang berusaha di perikanan tangkap dengan *stakeholders* yang berusaha di luar perikanan tangkap tetapi memanfaatkan sumberdaya laut sebagai pendukung usahanya seperti usaha pariwisata, tambak, dan kegiatan tambang.

bahkan pada hari pasar di Weiwerang, ibukota Kecamatan Adonara Timur, pendapatan mereka mencapai Rp 100.000 lebih. Warga yang berbelanja di pasar tersebut tidak saja berasal dari Kecamatan Adonara sendiri seperti yang ada di pasar sore yang berlangsung setiap hari tetapi pembeli dan penjual dalam jumlah terbatas, pada pasar besar yang berlangsung setiap hari Selasa, pembeli dan penjual datang dari luar kecamatan bahkan luar pulau. Mereka ini yang banyak memanfaatkan jasa tukang ojek terutama untuk transportasi antara pasar dengan pelabuhan yang jaraknya tidak lebih 500 meter.

F. Rangkuman

Aktivitas kenelayan di Desa Lamahala merupakan kegiatan yang sudah turun temurun, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Keahlian menangkap ikan diperoleh nelayan Lamahala secara alami, baik dengan melihat sendiri kegiatan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya maupun dengan ikut serta turun ke laut sejak usia dini. Oleh sebab itu, hampir seluruh penduduk laki-laki usia dewasa di Desa Lamahala pernah merasakan bagaimana cara menangkap ikan, termasuk orang yang sudah tua sekalipun. Bersamaan dengan pengenalan akan kegiatan kenelayan, keberanian dan kemampuan untuk menaklukkan laut bebas guna menangkap ikan secara bersamaan diperkenalkan. Hanya saja bagi masyarakat Lamahala, seluruh penduduknya tidak lagi menjadi nelayan karena ada beberapa alternatif pekerjaan lain yang lebih dipilih seperti tukang ojek yang relatif banyak ditemukan di Desa Lamahala yang berdekatan dengan ibukota kecamatan di Weiwerang.

Nelayan di Lamahala hanya menangkap ikan yang tergolong kecil dan sedang, tidak seperti nelayan tetangga yang berada di Lamalera dan Solor. Nelayan di kedua daerah itu memiliki keahlian untuk berburu paus yang melintas di Laut Sawu. Kendati Laut Sawu dan sekitarnya kaya akan sumber daya ikan terkait dengan pertemuan dua arus bawah laut, potensi itu belum dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Lamahala, terlihat

dari jumlah penduduk yang dikelompokkan sebagai keluarga prasejahtera, sejahtera I, dan sejahtera II yang masih begitu tinggi. Padahal, berdasarkan pengalaman melaut yang diperoleh secara turun temurun, laut sebenarnya rumah nelayan yang kedua sehingga pengenalan tempat-tempat ikan untuk mereka tangkap sesungguhnya bukan perkara sulit. Fenomena alam yang ada dapat mereka terjemahkan apakah fenomena itu sesuatu yang menguntungkan atau merugikan ketika aktivitas turun ke laut dilakukan.

Dalam perkembangannya, potensi kekayaan sumberdaya ikan dan keahlian untuk membaca fenomena alam tidak mampu membuat mereka lebih sejahtera, dan kehidupan mereka seperti jalan ditempat. Oleh sebab itu, membentuk sebuah organisasi nelayan yang sesungguhnya sangat diperlukan bukan sekedar organisasi untuk menyiasati agar mudah mendapatkan bantuan dari pihak yang memberikan perhatian pada kehidupan nelayan. Karena dengan berorganisasi, sesungguhnya mereka dapat saling berbagi informasi bahkan dapat bertumbuh bersama-sama ke arah yang lebih baik, karena dengan membentuk organisasi jumlah tangkapan ikan apabila dikumpulkan menjadi lebih banyak sehingga pasar yang mungkin dijangkau akan lebih luas.

Melihat hasil tangkapan yang didominasi ikan kecil apabila dijual dalam bentuk utuh tidak memberikan dampak ekonomi yang positif, sudah waktunya untuk mengolah ikan-ikan kecil tersebut menjadi bentuk makanan lain. Intervensi teknologi untuk merubah ikan tersebut menjadi bahan makanan olahan agar nilai ekonominya lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan lebih signifikan sudah harus dilakukan. Untuk itu, perhatian pihak terkait terutama pemerintah yang membidangi perikanan sangat dinantikan.

Hal lain yang harus mendapat perhatian dari pihak terkait adalah penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Kalau penggunaan bahan peledak terus berlanjut, suatu saat konflik antar-nelayan akan terjadi karena pengaruh dari penggunaan ledakan sangat berdampak negatif pada ikan dan

ekosistem laut. Bagi nelayan, laut adalah rumah kedua mereka yang memberikan kehidupan walaupun bukan pada tingkat yang dapat dikatakan sejahtera sesuai dengan realitas kehidupan yang mereka jalani. Apabila rumah kedua ini mereka dirusak, baik oleh pihak lain maupun oknum nelayan, hal itu dapat mengakibatkan kehidupan yang dijalani nelayan menjadi terganggu seperti yang terjadi di Lamahala. Upaya perusakan sumberdaya laut dengan menggunakan bom tersebut, itu sesungguhnya pluit konflik di antara nelayan sedang dibunyikan.

Pustaka Acuan

- Adhuri, Dedi S., R. Indrawasih, A. Wahyono, 2006. *Konflik-konflik Kenelayanan: Distribusi, Pola, Akar Masalah dan Resolusinya*. Jakarta: LIPI Press.
- Barnes, R.H., 2005. *The Murder of Sengaji Begu: A Turning Point in Dutch Involvement in the Solor Archipelago*. Dalam *Masyarakat Indonesia* 31 (1). Hlm. 1-18.
- Blog Larantuka, *Prospek Perikanan Laut Larantuka*, dalam *Larantuka2009.blogspot.com*. (Akses tgl. 10 April 2012).
- Ditjen KP3K, 2008. *Klinik Bisnis Diharapkan Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat Pesisir*, dalam http://www.dkp.go.id/index2.php?option=com_content&task=view&id=96 (Diakses tanggal 24 September 2008).
- Hutomo, Malikusworo, 1998. *Integrated Coastal Zone Management Activities in Indonesia*, dalam U Han Tin dan Daw Yin Yin Lay (Editor), *Integrated Coastal Zone Management in Southeast and East Asia*, Proceeding of the ECOTONE VII, 15-19 June 1998, Yangon, Myanmar. Hlm. 19-33.
- Imron, Masyhuri, 1997. *Peran 'Bos' dan Dampak Sosial Ekonomi Nelayan di Rinca*, dalam *Masyarakat Indonesia* 23(2). Hlm. 169-184.
- Kusnadi, 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mudaj, Yoseph Pati, 2008. "Mentalitas Kolektif dan Kosmologis Orang Lamaholot". Dalam *Pos Kupang* edisi 14 Nov 2006 dalam <http://ansel-boto.blogspot.com/2008/01/mentalitas-kolektif-dan-kosmologis.html> (Diunduh tgl 11 Juli 2011)
- Mustika, Putu Liza Kusuma, 2006. *Marine Mammals in the Savu Sea (Indonesia): Indigenous Knowledge, Threat Analysis and Management Options*. Thesis submitted for the degree of Master of Science in the School of Tropical Environment Studies and Geography James Cook University.
- Nadjib, Mochammad. 2003. *Kegiatan Melaut Nelayan dan Kerusakan Lingkungan Pesisir*, dalam Zarmawis Ismail (Penyunting) *Dampak Kerusakan Lingkungan Pesisir terhadap Tingkat Sosial Masyarakat Nelayan*. Jakarta: P2E-LIPI. Hlm.:50-78.
- Nedelec, 2000. *Alat Penangkapan Ikan*, Dalam <http://purseseine.blog-spot.com/2011/02/purse-seine.html> (Diakses, 12 April 2012).
- Nugroho, I. Dan R. Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Poernomo, Soen'an H., 2011. *Tahun 2015, Indonesia Tingkatkan Produksi Perikanan*, dalam <http://www.ppnsi.org/index.php?view=article&catid=15%3Aperikanan-a-kelautan..>(Akses tgl 12 April 2012).
- Pulungan, Yunus P, Tt. *Penangkapan Ikan tidak Ramah Lingkungan di Kepulauan Padaido Kabupaten Biak: Dampak dan Strategi Pengelolaannya*, dalam www.scribd.com/doc.(Akses tgl. 10 Mei 2012).
- Rahman, Mujib, 2007. *Makin Kaya di Negeri Miskin*, dalam <http://www.gatra.com/artikel.php?id=109203>. (Diakses tanggal 19 Mei 2008).
- Sunoto, Tt. *Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia*. dalam http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi2%20pdf2c.pdf. (Akses tgl. 12 April 2012).
- Sutton, Mark O., dan E.N. Anderson. 2004. *Introduction to Cultural Ecology*. North America: Altamira Press.
- Yuniardi, Dimas, 2011. *Potensi Perikanan*, dalam <http://ekonomi.kompasia-na.com/agrobisnis/2011/06/27/potensi-perikanan/> (Akses 18 April 2012).

Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul

Women's Participation on the Implementation of Social Empowerment Programme in Bantul Regence

E. Yuningtyas Setyawati dan Andreas A. Susanto

Dosen Sosiologi FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari 6 Yogyakarta 55281. Telpon (0274)487711. Faximile (0274) 487748. E-mail: yuningtyas_06@yahoo.com. Diterima 15 Januari 2013, disetujui 5 Maret 2013.

Abstract

Women's participation is an integral part of social empowerment, yet there are still problematic issues to be tackled and a lot of gaps to be filled concerning with women's empowerment. This study aims to describe women's participation in the stages of implementation of the social empowerment programme in Bantul regence, to explain the reasons for women's involvement in the implementation of the programme, and to investigate factors that support and inhibit women's empowerment. Research questions included: Why women in Bantul regency are willing to get involved in the implementation of social empowerment programme? How do these women get involved at each stage of the implementation of social empowerment programme? What are the support and inhibit factors in the process of women's empowerment in Bantul regency? A quantitative approach in the form of embedded case study is used in this study due to its determined focus. Primary data were collected through observation, non-structured interviews, and in-depth interviews. Secondary data were collected from related document such as government and NGO reports. The data for the study was analysed by following Miles and Huberman's interactive model of data analysis (1994). This study shows that although women have been involved and participated in each stage of social empowerment programme, at earlier stage they have done so not by their own conscience but to comply with programme requirement imposed by the administrator. At later stage, their involvements can be seen as a passive participation and were based on a desire to study and to satisfy their constituents. The inhibiting factors in the process of women's empowerment were the internal disagreement among programme administrators; women were forced to become programme administrators; over-involvements of the government administrators; the programmes were more physical or material oriented; elitist programmes; lack of family support to women's involvements. The factors that supported the process of women's empowerment were the determination in applying women's empowerment principles and the strong will to learn among the women who in charge of the programme administrators.

Keywords: Women's Participation-Empowerment Programme-Supporting and Inhibiting Factors.

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dari upaya suatu bangsa untuk menghadapi tantangan yang bersifat global. Salah satu bidang pemberdayaan masyarakat yang masih perlu mendapatkan perhatian saat ini adalah pemberdayaan perempuan. Di Indonesia untuk saat ini kesenjangan yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan masih terlihat dengan jelas. Oleh karena itu tujuan studi ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan pada setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul, kemudian menjelaskan alasan-alasan para perempuan di Kabupaten Bantul terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dan menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul. Adapun permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah mengenai bagaimanakah gambaran partisipasi perempuan yang sesungguhnya pada setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul? Mengapa para perempuan desa di Kabupaten Bantul bersedia untuk terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat? Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang ditemui dalam proses pemberdayaan perempuan di desa tersebut? Jenis studi yang dipilih adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan bentuk studi kasus terpancang atau *embbaded case study*. Pemilihan bentuk studi kasus terpancang tersebut, dikarenakan studi ini sudah menentukan fokusnya. Data dikumpulkan dengan melalui penelusuran data primer dan sekunder yang dijarah melalui observasi, wawancara tak berstruktur, *in depth interview*, serta dokumentasi. Proses analisis data yang digunakan dalam studi ini menggunakan model